

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) PPN MASA TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP MAKASSAR SELATAN

AKHMAD MAULANA ABDUH



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) PPN MASA TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP MAKASSAR SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AKHMAD MAULANA ABDUH
A31109307**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK(e-SPT) PPN MASA TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

AKHMAD MAULANA ABDUH
A31109307

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Februari 2015

Pembimbing I

Drs. Syahrir, M.Si., Ak., CA.
NIP. 19660329 199403 1 003

Pembimbing II

Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA.
NIP. 19581110 198710 1 001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19650925 199002 2 001

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) PPN MASA TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

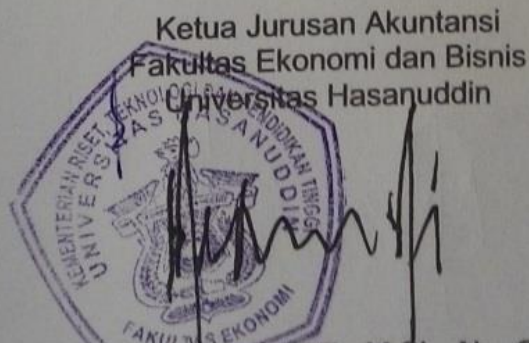
AKHMAD MAULANA ABDUH
A31109307

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **23 April 2015** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syahrir, M.Si., Ak., CA.	Ketua	1.
2.	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA.	Sekretaris	2.
3.	Drs. Mushar Mustafa, MM., Ak., CA.	Anggota	3.
4.	Drs. Muh. Nur Aziz, MM.	Anggota	4.
5.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA.	Anggota	5.



Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19650925 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : AKHMAD MAULANA ABDUH
NIM : A31109307
jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK(e-SPT)
PPN MASA TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI
WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK
PADA KPP MAKASSAR SELATAN**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2015

Yang membuat pernyataan,

AKHMAD MAULANA ABDUH

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN Masa Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Makassar Selatan”. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibunda Hj. Syamsiar dan Ayahanda Drs. H. Tandri Pauk Abduh yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang. Terima kasih telah menjadi pembimbing utama dalam kehidupan peneliti. Peneliti menyadari bahwa peneliti tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua dengan apapun sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala hal yang terbaik kepada anaknya ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh keluarga besar peneliti dimanapun kalian berada, terima kasih atas doanya selama ini.

2. Bapak Drs. Syahrir, M.Si., Ak., CA. dan Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dari awal hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Muallimin, M.Si. selaku Penasehat Akademik peneliti, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester satu hingga selesainya peneliti menempuh studi.
4. Bapak Drs. Mushar Mustafa MM., Ak., CA. Bapak Drs. Muh. Nur Azis, MM. dan Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak. selaku tim penguji.
5. Ibu Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini tak kenal lelah mentransfer ilmu khususnya kepada peneliti serta kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara keseluruhan, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.
7. Seluruh Staff Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan atas sikap kooperatifnya selama penelitian dilaksanakan.
8. Lathiif Muharram Hamdu dan Aziza Tandri yang selalu ada untuk memberikan dukungan, doa, dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para pegawai Jurusan Akuntansi diantaranya: Pak Aso, Pak H. Tarru, Pak Jamal dan pegawai akademik Fakultas Ekonomi diantaranya: Pak Ical, Pak Asmari, Pak Umar, Pak Safar, H. Muis, Pak Akbar, Pak Budi

dan seluruh staff lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.

10. Arfan, Pajar, Deki, Edib, Diaz, Boy, Tope', Ako, Mawan, Chiwank, Ucu', Hasyim, Ummah, Uya, Dade, Ikhmar, John, Irma, Illa, Fatma, Mirna, Yaya, Pute', Pite', dan seluruh teman-teman K09nitif yang tidak sempat disebut namanya terima kasih banyak karena telah banyak membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti.
11. Kanda dan Adinda Fakultas Ekonomi Angkatan 2007, 2008, 2010, 2011, dan 2012 serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti
12. Teman – teman KKN Posko Adolang
13. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-satu. Terima kasih atas semua bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Februari 2015

Peneliti

ABSTRACT

PENGARUH PENERAPAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK (e-SPT) PPN MASA TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK: SURVEY TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP MAKASSAR SELATAN

EFFECT THE IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC NOTICE SYSTEM (e-SPT) PPN PERIOD TOWARDS EFFICIENCY OF SPT FILLING AS PERCEIVED BY THE TAXPAYER: SURVEY OF TAXABLE ENTERPRISES IN SOUTH MAKASSAR TAX SERVICE OFFICE

Akhmad Maulana Abduh
Syahrir
M. Christian Mangiwa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode survey dan analisis regresi sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengusaha kena pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SPT PPN yang terdiri dari dimensi urgensi penerapan e-SPT, tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi kepada wajib pajak, dan kendala dalam penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT sebesar 38,6 persen, sedangkan 61,4 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Kata kunci: Surat Pemberitahuan, penerapan e-SPT , efisiensi pengisian SPT

The purpose of this research is to examine the influence on the implementation of an electronic notice system (e-SPT) value added tax (VAT) towards efficiency of SPT filling at South Makassar tax office. On this thesis, the author uses survey method with simple regression analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to registered taxable enterprise at South Makassar Tax Office. Result of this research showed that the variables of the implementation of e-SPT (Value Added Tax) which consists of four dimensions (urgency of e-SPT, the purpose of e-SPT, socialization to taxpayers, and obstacles in the implementation of e-SPT) has a significant influence towards efficiency of SPT filling by 38,6 percent and 61,4 percent influenced by other variable.

Keywords: annual tax return, implemantation of e-SPT, efficiency of SPT filling

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.1.4 Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.1.6 Pajak Negara	15
2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)	17
2.1.2.1 Pengertian SPT	17
2.1.2.2 Fungsi SPT	18
2.1.2.3 Jenis SPT.....	19
2.1.2.4 Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT.....	20
2.1.2.5 Pembetulan SPT	22
2.1.2.6 Batas Waktu Penyampaian SPT	23
2.1.2.7 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT	23
2.1.2.8 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT ..	24
2.1.3 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)	26
2.1.3.1 Pengertian e-SPT.....	26
2.1.3.2 Tata Cara Pelaporan e-SPT	27
2.1.3.3 Tujuan e-SPT	28
2.1.3.4 Kelebihan e-SPT	29
2.1.3.5 Fasilitas e-SPT Masa PPN	30
2.1.3.6 Tata Cara Penyampaian e-SPT.....	31
2.1.3.7 Tata Cara Pembetulan e-SPT	32
2.1.4 Perbedaan dan Persamaan SPT Manual dan e-SPT	32
2.1.4.1 Perbedaan SPT Manual dan e-SPT	32

2.1.4.2 Persamaan SPT Manual dan e-SPT.....	32
2.1.5 Efisiensi	33
2.1.5.1 Pengertian Efisiensi.....	33
2.1.6 Persepsi.....	34
2.1.6.1 Pengertian Persepsi	34
2.1.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran	37
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Rancangan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi	40
3.6.1 Variabel Penelitian	40
3.6.2 Definisi Operasional	40
3.6.3 Instrumen Penelitian	41
3.7 Analisis Data.....	42
3.7.1 Analisis Regresi Sederhana.....	42
3.7.2 Uji Kualitas Data	43
3.7.2.1 Uji Realibilitas	43
3.7.2.2 Uji Validitas	43
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	44
3.7.3.1 Uji Normalitas.....	44
3.7.3.2 Uji Homogenitas.....	44
3.7.4 Pengujian Hipotesis	45
3.7.4.1 Koefisien Determinasi	45
3.7.4.2 Uji Hipotesis (Uji-t).....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Gambaran Umum	47
4.1.1 Statistik Deskriptif	47
4.1.1.1 Variabel X	47
4.1.1.2 Variabel Y	48
4.2 Persepsi Responden Terhadap Penerapan e-SPT PPN	48
4.3 Persepsi Responden Terhadap Efisiensi Pengisian SPT	50
4.4 Uji Kualitas Data	52
4.4.1 Reliabilitas Data	53
4.4.2 Validitas Data.....	54
4.4.3 Reliabilitas Data Tanpa Butir Dua	55
4.4.4 Validitas Data Tanpa Butir Dua	56
4.5 Uji Asumsi Klasik	56
4.5.1 Uji Normalitas Data	57
4.5.2 Uji Homogenitas	58
4.6 Analisis Statistik.....	59
4.6.1 Koefisien Determinasi R^2	59
4.6.2 Uji Parsial (-t)	60
4.7 Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
5.2.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya	63
5.2.2 Saran Untuk Institusi	64
5.3 Keterbatasan Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan SPT dan e-SPT	32
3.1 Definisi Operasional Variabel	41
4.1 Gambaran Umum Data Variabel Independen	47
4.2 Gambaran Umum Data Variabel Dependen	48
4.3 Frekuensi dan Skor Responden pada Variabel Independen	49
4.4 Frekuensi dan Skor Responden pada Variabel Dependen	51
4.5 Hasil Uji Reliabilitas	53
4.6 Hasil Uji Validitas	54
4.7 Hasil Uji Reliabilitas tanpa Butir Dua	55
4.8 Hasil Uji Validitas tanpa Butir Dua	56
4.9 Hasil Uji Normalitas Data	57
4.10 Hasil Uji Normalitas Data Dengan <i>Predicted Value</i>	57
4.11 Hasil Uji Homogenitas	58
4.12 Koefisien Determinasi R^2	59
4.13 Hasil Uji t	60

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kuesioner Penelitian	69
2 Jawaban Responden Variabel X	72
3 Jawaban Responden Variabel Y	75
4 Bentuk SPT Manual Masa PPN	78
5 Bentuk e-SPT	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan yang secara turun temurun dikelola untuk membiayai pemerintahan negara. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana setiap orang wajib membayar pajak.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian peranan pajak sangat penting bagi suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) ditunjuk untuk mengelola pajak yang di bawah oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan, berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat di pungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Reformasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara salah satunya mengembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). Penerapan e-SPT diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (e-SPT) secara Elektronik. Program ini diciptakan dalam rangka menjawab dan menyikapi peningkatan kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebutuhan-kebutuhan para komunitas wajib pajak tersebut, diantaranya mengenai peningkatan pelayanan pajak yang semakin baik, penghematan biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan *konstruktif* untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara *komprehensif* sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok secara langsung menyentuh pilar perpajakan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (Rahayu, 2009:109)

Sistem terkomputerisasi dan *online* yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan secara *self assessment*. Berbeda dengan sistem perpajakan terdahulu, yaitu *office assessment*, sistem *self*

assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. e-SPT merupakan bentuk penyampaian SPT dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan DJP. Dalam kenyataannya, sistem ini telah memberikan kemudahan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT. Tetapi belum dapat dipastikan apakah penerapan e-SPT tersebut dapat mengatasi seluruh kelemahan sistem sebelumnya dan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Kewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik itu diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik. Wajib Pajak (WP) wajib membuat SPT elektronik (e-SPT) yaitu SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh pihak Ditjen Pajak. SPT dimaksud adalah surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Penyampaian e-SPT oleh WP ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi (kurir) dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh, dan/atau SPT Masa PPN, dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan berkas data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.

Surat pemberitahuan (SPT) yang selama ini digunakan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Dimana wajib pajak melaporkan pajak terutanganya dalam bentuk *hardcopy*

(dokumen) yang telah disediakan oleh KPP. Hal ini akan merepotkan wajib pajak khususnya wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar yaitu dengan harus melampirkan *hardcopy* dalam jumlah yang besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat dan mengakibatkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Berbeda dengan surat pemberitahuan (SPT) secara manual, pengisian e-SPT akan memudahkan wajib pajak melaporkan pajak terutang karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan di KPP melainkan hanya perlu melakukan instalasi aplikasi (*software*) yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.

Administrasi perpajakan PPN manual, menyebabkan bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajaknya khususnya para PKP menjadi tidak optimal. Menurut Forest dan Sheffrin dalam Rahayu (2009:140) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayaran pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Jika sistem perpajakan *simplifying* maka PKP lebih mudah melakukan kegiatan administrasi pelaporan SPT. Sistem administrasi perpajakan yang sederhana tentunya memberikan kemudahan dalam hal waktu dan proses input data. Dengan adanya e-SPT diharapkan dapat mewujudkan kesederhanaan sistem administrasi perpajakan.

Penelitian yang berkaitan dengan e-SPT telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Sitompul (2010), Lingga (2012), dan Juhardini (2013). Hasil penelitian Sitompul (2010) mengenai Pengaruh Penerangan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) Terhadap Tingkat Kepuasan PKP Pengguna Aplikasi (e-SPT PPN) menunjukkan bahwa Penerapan e-SPT PPN sudah baik dan mampu memenuhi tingkat kepuasan PKP pengguna e-SPT PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Terdapat hubungan yang kuat antara penerapan e-SPT PPN dengan tingkat kepuasan PKP pengguna e-SPT PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees yaitu dengan diketahui H_0 ada pada daerah penolakan berarti H_a diterima atau penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.

Penelitian Lingga (2013) dengan judul “ Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung”. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Juhardini mengenai Efektivitas elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efektivitas e-SPT PPN mendapatkan prosentase sebesar 68,5% dengan kategori efektif. Sedangkan untuk sub-variabel jumlah hasil yang dikeluarkan mendapatkan prosentase sebesar 70,1% (efektif). Kemudian sub-variabel tingkat kepuasan yang diperoleh mendapatkan prosentase sebesar 75,1% (efektif). Selanjutnya untuk sub-variabel produk kreatif mendapatkan prosentase sebesar 57,7% (cukup efektif).

Sub-variabel yang terakhir yaitu intensitas yang dapat dicapai mendapatkan prosentase sebesar 71,2% (efektif).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT khususnya e-SPT PPN, untuk mengetahui sejauhmana efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak khususnya PKP yang ada di Makassar. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *electronic* ini tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya misalnya, disebabkan karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara *electronic*.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari penelitian Ita Salsalina Lingga (2012) dengan mengambil objek di Makassar.

Peneliti memilih PKP yang berada di kota Makassar karena dalam kenyataannya masih banyak tuntutan berbagai pihak Wajib Pajak (WP) yang dalam hal ini perlu dikaji peneliti untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT menurut persepsi wajib pajak di PKP kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN Masa Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Makassar Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak
2. Bagaimana penerapan e-SPT pada KPP Makassar Selatan menurut persepsi wajib pajak?
3. Bagaimana efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak?
4. Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak
2. Untuk mengetahui penerapan e-SPT PPN pada KPP Makassar Selatan menurut persepsi wajib pajak.

3. Untuk mengetahui efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perpajakan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi lain menurut Seoemitro (1990:5) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang diatur oleh undang-undang, dampaknya tidak dapat terlihat langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh akan sangat membantu perekonomian Negara.

Waluyo (2010:3) mengemukakan bahwa terdapat lima ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Waluyo (2010:6) mengemukakan adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013 :2-3) mengemukakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. **Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. **Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2013:5-6).

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : pajak reklame, pajak hiburan.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo, 2010: 17) menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.6 Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku (Mardiasmo, 2013:11-12) adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku

sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai.

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan merupakan pengganti.

- a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.
- b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.
- c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
- d. Ordonansi Verponding tahun 1982.
- e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.
- f. Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
- g. Undang-undang nomor 11 Prp. tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa.

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tercantum dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi.

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT (Waluyo, 2010:32) adalah:

1. Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan , dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Lengkap yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. Jelas yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

2.1.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi yang berbeda bagi pihak yang berkepentingan. Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak (Waluyo, 2010:31-32), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan/atau

- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2. Fungsi bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3. Fungsi bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan

2.1.2.3 Jenis Surat Pemberitahuan

Diana dan Setiawati (2009:124-125) memaparkan ada dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu:

- 1. Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian

dari jangka waktu 1 Tahun Pajak. Contoh: SPT Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Contoh: SPT Masa PPN dan PPnBM, dan SPT Pajak Penghasilan.

2.1.2.4 Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT

Dalam Mardiasmo (2013:32) menerangkan bahwa untuk menjalankan kewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ada tahapan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu:

- a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

- b. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar atau dikukuhkan atau tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- c. Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - 1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - 2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - 3. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.2.5 Pembetulan Surat Pemberitahuan

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atau jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.
2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT atas pengungkapan wajib pajak, hal ini menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar; atau
3. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil; atau

4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

2.1.2.6 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (Mardiasmo, 2013:35) adalah:

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.1.2.7 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan kepada Direktur Jendral Pajak (Mardiasmo, 2013:35).

Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan (Sari, 2013;203-204) dengan syarat:

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
2. Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
3. Wajib Pajak melampirkan Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.
4. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terhutang menurut perhitungan sementara.
5. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT.
6. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama enam bulan.
7. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan Surat Teguran.

2.1.2.8 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa:
Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:
 - a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.
 - b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
 - c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00.

- d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.
2. Pasal 13A UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit satu kali dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat dua bulan/paling lama satu tahun.
 3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:
 - a. Sanksi pidana denda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit enam bulan atau paling lama enam tahun.
 - b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.
 - c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar/lengkap dalam rangka
 - d. restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit enam bulan, paling lama dua tahun dan didenda paling sedikit dua kali paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

2.1.3 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

2.1.3.1 Pengertian e-SPT

Salah satu upaya e-system dalam hal modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan *e-filing* (*electronic filing*). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP”. Adanya sistem e-SPT, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor-kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.

Electronic Surat Pemberitahuan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Elektronik SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.3.2 Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a. Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - c. Faktur Pajak.
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari siste yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib Pajak mencetang bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.

6. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, *flashdisk*).
7. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
 - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
 - b. Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bukti penerimaan e-SPT yang di sampaikan:
 - a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda terima penerimaan surat dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.
 - b. Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti elektronik.

2.1.3.3 Tujuan e-SPT

Tujuan penerapan e-SPT adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.

2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

2.1.3.4 Kelebihan e-SPT

Kelebihan e-SPT adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik.

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.3.5 Fasilitas e-SPT Masa PPN

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.
2. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya
Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT pembetulan.
3. *User Profiles*
Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya.
4. Memelihara data Wajib pajak Lawan transaksi

Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya.

6. *Generate data digital SPT*

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk CD atau flashdisk atau dikirimkan secara online.

2.1.3.6 Tata Cara Penyampaian e-SPT

Tata cara penyampaian e-SPT menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 3 Angka 1 adalah:

“Penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan:

- a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
- b. Melalui *e-Filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

2.1.3.7 Tata Cara Pembetulan e-SPT

Tata cara pembetulan e-SPT menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP, cara pembetulan e-SPT adalah:

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
2. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

2.1.4 Perbedaan dan Persamaan SPT Manual dan e-SPT

2.1.4.1 Perbedaan SPT dan e-SPT

Perbedaan SPT dan e-SPT dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan SPT dan e-SPT

Perbedaan	SPT (Surat Pemberitahuan)	e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)
Bentuk	Formulir Kertas	Data Elektronik
Penyampaian	Secara Manual dibawa langsung ke KPP/KP2KP atau melalui jasa Pos/Ekspedisi/Kurir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Manual 2. Secara Elektronik (<i>e-filing</i>) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)

2.1.4.2 Persamaan SPT Manual dan e-SPT

Persamaan SPT Manual dan e-SPT adalah sebagai alat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek

Pajak dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban. Persamaan lain dari SPT Manual dan e-SPT yaitu formulir 1111 e-SPT maupun SPT manual dilaporkan/disampaikan menggunakan media kertas (*Hardcopy*). Meskipun kedua alat ini menggunakan metode yang berbeda akan tetapi nilai yang dihasilkan sama.

2.1.5 Efisiensi

2.1.5.1 Pengertian Efisiensi

Istilah efisiensi berasal dari kata efisien yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan cepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna penciptaan hasil yang optimum.

Definisi lain tentang Efisiensi menurut Emerson (2013: Online) adalah:

"Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan".

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

2.1.6 Persepsi

2.1.6.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Definisi lain tentang persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (Gibson *et al*, 2012:online). Oleh karena itu, setiap individu memberikann arti kepada stimulus secara berbeda meskipun obyeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

2.1.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang memperngaruhi persepsi seseorang menurut Toha (2014: Online) adalah:

1. Faktor internal: perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai e-SPT telah dilakukan beberapa kali mengambil sampel dan variabel yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2010) yaitu “Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) terhadap Tingkat Kepuasan PKP Pengguna Aplikasi”. Penelitian itu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN sudah baik dan mampu memenuhi tingkat kepuasan PKP pengguna e-SPT PPN pada KPP Pratama Bandung Karees. Terdapat hubungan yang kuat antara penerapan e-SPT dengan tingkat kepuasan PKP pengguna e-SPT PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees yaitu dengan diketahui H_0 ada pada daerah penolakan berarti H_a diterima atau penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna e-SPT PPN pada KPP Bandung Karees.

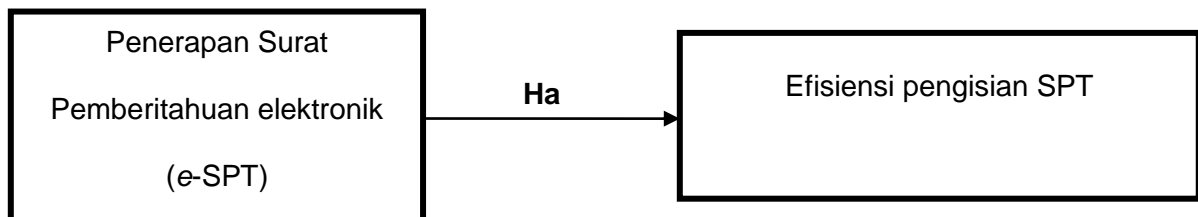
Penelitian Lingga (2012) dengan judul “Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bahwa apakah dengan adanya e-SPT akan meningkatkan efisiensi pengisian SPT. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan responden sebesar 133 PKP yang menggunakan e-SPT PPN di Majalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

Penelitian yang dilakukan Juhardini (2013) dengan judul “Efektivitas elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan KPP dengan jumlah PKP terbesar jika dibandingkan dengan yang sama-sama terletak di Gedung Keuangan Negara II Surabaya, yaitu berjumlah 2.093 PKP. Teknik pengambilan sampelnya *random sampling* dengan menggunakan rumus Solvin sehingga sampelnya berjumlah 95 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penyebaran angket (kuesioner). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efektivitas e-SPT PPN mendapatkan prosentase sebesar 68,5% dengan kategori efektif. Sedangkan untuk sub-variabel jumlah hasil yang dikeluarkan mendapatkan prosentase sebesar 70,1% (efektif). Kemudian sub-variabel tingkat kepuasan yang diperoleh mendapatkan prosentase sebesar 75,1% (efektif). Selanjutnya untuk sub-variabel produk kreatif mendapatkan prosentase sebesar 57,7% (cukup efektif). Sub-variabel yang terakhir yaitu intensitas yang dapat dicapai mendapatkan prosentase sebesar 71,2% (efektif).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 dijelaskan bahwa "Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP". Adanya sistem e-SPT, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor-kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.

Lingga (2012) melihat Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama X, Bandung. Penelitian ini bertujuan mengetahui bahwa apakah dengan adanya e-SPT akan meningkatkan efisiensi

pengisian SPT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

Elektronik SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Berdasarkan pemaparan diatas, kemudian penulis menurunkan hipotesis, yaitu:

H_a : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif, yaitu menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Data diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menerapkan e-SPT PPN yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut berupa kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh PKP yang terdaftar di KPP Makassar Selatan dan menggunakan e-SPT PPN.

3.2 Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-SPT PPN Masa dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Makassar Selatan. Sampel penelitian ini adalah PKP yang menggunakan e-SPT PPN Masa di KPP Makassar Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang berupa jawaban kuesioner, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang direplikasi dari penelitian Lingga (2012).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan data-data di obyek penelitian, peneliti menggunakan teknik kuesioner yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan sistematis serta dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada responden dan terakhir diserahkan kembali kepada peneliti.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efesiensi pengisian SPT (Y). Sedangkan variable independen (X) yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT PPN (X).

3.6.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam Sekaran dan Bougie (2009:127) adalah mereduksi konsep-konsep abstrak ke dalam konsep yang jelas cara

pengukurannya. Untuk memberikan arah dalam menganalisis data diperlukan definisi operasional dari masing-masing variable penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi:

Table 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Variabel Dependen: Efisiensi Pengisian SPT (Y)	Kemampuan e-SPT dalam meningkatkan kecepatan pengisian SPT, keakuratan pengisian SPT, dan mengurangi ruang penyimpanan dokumen SPT.	1. Kecepatan 2. Keakuratan 3. Efisiensi Ruang Penyimpanan
Variabel Independen: Penerapan e-SPT (X)	Salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.	1. Urgensi diterapkannya e-SPT 2. Tujuan penerapan e-SPT 3. Sosialisasi Wajib Pajak 4. Kendala dalam penerapan e-SPT

3.6.3 Instrumen Penelitian

Konsep penelitian ini meliputi efisiensi pengisian SPT sebagai variable bebas. Adapun variable bebasnya penerapan e-SPT. Konsep tersebut diukur dengan memberikan skor untuk setiap jawaban responden. Adapun dalam setiap jawaban dari pertanyaan tersebut telah ditentukan skornya dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert, yaitu: nilai 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

Kuisisioner dalam penelitian ini pertanyaannya mengenai urgensi diterapkannya sistem e-SPT, tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi e-SPT kepada Wajib Pajak, kendala dalam penerapan e-SPT, kecepatan, keakuratan, dan efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan. Jenis pertanyaan adalah tertutup, dimana responden tinggal memberi tanda *tick mark* (v) pada pilihan jawaban

yang telah tersedia, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang direplikasi dari penelitian Lingga (2012).

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis. Analisis data dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

3.7.1 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik regresi sederhana yang berasal dari data sampel yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut yang dirumuskan dalam bentuk model sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan: Y = Variabel dependen (efisiensi pengisian SPT)

X = Variabel independen (penerapan e-SPT PPN)

a = *Intercept* atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat X = 0 sebesar a.

b = Koefisien regresi

3.7.2 Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

3.7.2.1 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah data yang ada telah terukur tepat dan tidak mengandung kesalahan material dari data yang diukur, proses pengukuran, maupun ukuran yang dipergunakan itu sendiri (Efferin *et al*, 2008:118). Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* (α) dari masing-masing instrument dalam satu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika memberikan nilai *consbranch's alpha* diatas 0,6 begitu pula sebaliknya.

3.7.2.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan apakah semua data tersebut telah mengukur segala sesuatunya dengan tepat, dalam arti memang yang diukur adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab *research questions* (Efferin *et al*, 2008:118). Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut tersebut berdistribusi normal, dan homogenitas. Uji asumsi klasik digunakan adalah uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Wijaya, 2012:132). Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kurva normal *probability plot*. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal (Nugroho, 2005:24).

3.7.3.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Dua di antaranya adalah mean dan varian. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen, sedangkan populasi-

populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen.

Faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, penyebaran yang kurang baik, bahan yang sulit untuk homogen, atau alat untuk uji homogenitas rusak. Apabila sampel uji tidak homogen maka sampel tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali mulai dari proses sampling sampai penyebaran bahkan bila memungkinkan harus diulangi sehingga mendapatkan sampel uji yang homogen.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai variabel yang dipakai. Untuk menguji hipotesis digunakan pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi dan uji t.

3.7.4.1 Koefisien Determinasi

Nugroho (2005: 50) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jadi, pada penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan penerapan e-SPT PPN memberikan pengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT.

3.7.4.2 Uji Hipotesis (Uji-t)

Nugroho (2005: 54) menjelaskan bahwa uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian jika menggunakan nilai signifikansi 5% adalah sebagai berikut:

1. jika nilai signifikan $t < 0,05$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan
2. jika nilai signifikan $t > 0,05$ berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Makassar Selatan, data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak melalui beberapa pernyataan mengenai pengaruh e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menerapkan e-SPT yang terdaftar pada KPP Makassar Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data selama satu bulan dimulai pada 17 November 2014 sampai tanggal 17 Desember 2014. Kuesioner yang disebarakan ke PKP yang menjadi objek penelitian berjumlah 95. Oleh karena itu jumlah data kuesioner yang dapat diolah sebanyak 95 kuesioner.

4.1.1 Statistik Deskriptif

4.1.1.1 Variabel X

Tabel berikut merupakan gambaran umum kondisi data variabel independen, penerapan e-SPT PPN.

Tabel 4.1 Gambaran Umum Data Variabel Independen

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X	95	40.00	67.00	5194.00	54.6737	4.89342
Valid N (listwise)	95					

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel di atas menunjukkan skor minimum responden terkait penerapan e-SPT PPN adalah 40 sedangkan skor maksimum mencapai 67 dari 14 pertanyaan. Jika dirata-ratakan diperoleh nilai sebesar 54,6737. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 4,893 menunjukkan data pada variabel independen cukup bervariasi.

4.1.1.2 Variabel Y

Tabel di bawah mendeskripsikan kondisi umum data terkait variabel dependen yang diperoleh dari responden.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Data Variabel Dependen

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y	95	18.00	30.00	2337.00	24.6000	2.46853
Valid N (listwise)	95					

Sumber : Hasil Olahan Data

Secara deskriptif didapatkan skor minimum responden terkait efisiensi pengisian SPT ialah 18 dan skor maksimum mencapai 30 dari enam pertanyaan. Rata-rata yang diperoleh ialah 24,6 dengan standar deviasi 2,4685. Standar deviasi tersebut menunjukkan jawaban responden terkait variabel dependen tidak terlalu bervariasi dibandingkan dengan jawaban responden pada variabel independen.

4.2 Persepsi Responden Terhadap Penerapan e-SPT PPN

Jumlah item pertanyaan pada variabel penerapan e-SPT PPN terdiri atas 14 pertanyaan yang mencakup empat aspek yaitu urgensi diterapkannya e-SPT PPN, tujuan penerapan e-SPT, sosialisasi kepada Wajib Pajak, dan kendala dalam penerapan e-SPT. Dari 14 pertanyaan tersebut diperoleh data yang dapat disajikan secara deskriptif dalam bentuk persentase dengan menghitung jumlah

skor total/jumlah skor ideal x 100% dimana jumlah skor ideal = jumlah responden (95) x jumlah item (14) x nilai tertinggi (5).

Presentasi perbandingan jumlah skor total dan jumlah skor ideal memberikan gambaran mengenai penilaian jawaban responden dengan melakukan klasifikasi terhadap presentase yang dihasilkan dari frekuensi jawaban dan skor responden. Jika semakin mendekati 100% maka dapat dipersepsikan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik terkait penerapan e-SPT. Berdasarkan hasil penilaian responden diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3 Frekuensi dan Skor Responden Pada Variabel Independen

INDIKATOR	FREKUENSI JAWABAN										TOTAL SKOR
	5		4		3		2		1		
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Urgensi diterapkannya e-SPT	74	370	242	968	49	147	14	28	1	1	1514
Tujuan Penerapan e-SPT	91	455	251	1004	34	102	4	8	0	0	1569
Sosialisasi kepada Wajib Pajak	41	205	134	536	91	273	13	26	6	6	1046
Kendala dalam penerapan e-SPT	32	160	174	696	52	156	26	52	1	1	1065
Jumlah	238	1190	801	3204	226	678	57	114	8	8	5194
% tiap skor terhadap skor total	22,91%		61,69%		13,05%		2,19%		0,15%		
% skor total terhadap skor ideal	78,11%										

Sumber : Hasil Olah Data

Keterangan : 5 = Sangat setuju f = frekuensi
 4 = Setuju s= skor
 3 = Ragu-ragu
 2 = Tidak setuju
 1 = Sangat tidak setuju

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 22,91% responden memberikan jawaban sangat setuju, 61,69% memberi jawaban setuju, 13,05%

menjawab ragu-ragu, 2,19% menjawab tidak setuju, dan 0,15% menjawab sangat tidak setuju. Jika diklasifikan hanya dalam bentuk setuju dan tidak setuju maka hanya sebagian kecil responden (2,34%) yang tidak setuju dengan penerapan e-SPT PPN sedangkan mayoritas responden setuju dengan penerapan e-SPT PPN. Hal tersebut diperkuat dengan nilai perbandingan total skor dengan skor ideal yang mencapai angka 78,11%, angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden termasuk kategori baik. Oleh karena itu berdasarkan persepsi responden maka penerapan e-SPT dianggap telah sesuai dengan urgensi, tujuan, serta telah disosialisasikan dengan baik dan mampu mereduksi kendala-kendala yang sering dialami wajib pajak, namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal sosialisasi kepada wajib pajak seperti belum dilakukannya sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak, belum dipahaminya manfaat dan tujuan penerapan e-SPT oleh wajib pajak serta belum termotivasinya wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas elektronik SPT (e-SPT).

4.3 Persepsi Responden Terhadap Efisiensi Pengisian SPT

Pertanyaan terkait efisiensi pengisian SPT pada penelitian ini terdiri dari enam pertanyaan yang mencakup tiga aspek yaitu kecepatan, keakuratan, dan efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan. Analisis yang dilakukan melalui presentase jawaban responden dan perbandingan skor total dan skor ideal seperti yang telah dilakukan pada variabel penerapan e-SPT PPN.

Berdasarkan hasil pengumpulan data maka diperoleh tabel hasil penilaian responden sebagai berikut :

Tabel 4.4 Frekuensi dan Skor Responden pada Variabel Dependen

INDIKATOR	FREKUENSI JAWABAN										
	5		4		3		2		1		TOTAL SKOR
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
Kecepatan	31	155	128	512	20	60	11	22	0	0	749
Keakuratan	51	255	116	464	17	51	6	12	0	0	782
Efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan	62	310	114	456	12	36	2	4	0	0	806
Jumlah	144	720	358	1432	49	147	19	38	0	0	2337
% tiap skor terhadap skor total	30,81%		61,3%		6,29%		1,63%		0%		
% skor total terhadap skor ideal	82%										

Sumber : Hasil Olah Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 30,81% responden memberikan jawaban sangat setuju, 61,3% memberi jawaban setuju, 6,29% menjawab ragu-ragu, 1,63% menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Jika diklasifikasikan hanya dalam bentuk setuju dan tidak setuju maka hanya sebagian kecil responden (1,63%) yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan pandangan terkait efisiensi pengisian SPT sedangkan mayoritas responden setuju dengan efisiensi pengisian SPT. Hal tersebut diperkuat dengan nilai perbandingan total skor dengan skor ideal yang mencapai angka 82%, angka tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden termasuk kategori sangat baik.

Oleh karena itu berdasarkan persepsi responden maka efisiensi pengisian SPT dianggap telah efisien dengan mencakup tiga indikator yaitu kecepatan, keakuratan, dan pengarsipan namun masih perlu ditingkatkan

dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal kecepatan seperti belum dapat diketahuinya dengan cepat kesalahan dalam hal penghitungan serta belum tercapainya target waktu (penghematan waktu) dalam hal penghitungan dan pelaporan SPT.

4.4 Uji Kualitas Data

Sebelum melakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu data harus dapat dinyatakan valid dan reliabel. Uji kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji tersebut merupakan langkah untuk menyeleksi jawaban responden terhadap pertanyaan.

Uji validitas dilakukan melalui prosedur seleksi item. Prosedur pada uji validitas memperhatikan koefisien korelasi item total dimana skor item/butir dipandang sebagai nilai X dan skor total sebagai nilai Y. Syarat minimum untuk dapat dinyatakan valid adalah $r > 0,2$. Jadi bila terdapat nilai koefisien korelasi item total yang kurang dari atau sama dengan 0,2 maka butir tersebut dinyatakan tidak valid.

Jawaban responden terhadap pertanyaan di kuesioner harus diuji reliabilitasnya. Uji tersebut menunjukkan sejauh mana pernyataan pada kuesioner dapat dipahami oleh responden. Untuk uji reliabilitas digunakan metode Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 maka data dapat dinyatakan reliabel.

4.4.1 Uji Reliabilitas Data

Hasil uji reliabilitas pada jawaban dari responden dapat diperhatikan pada tabel di bawah :

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	20

Sumber : Hasil Olahan Data

Dari tabel di atas dapat diperhatikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,837. Nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dinyatakan reliabel dengan interpretasi bahwa responden memahami pernyataan yang ada pada kuesioner.

4.4.2 Validitas Data

Hasil uji validitas jawaban dari responden dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

	Scale Mean if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
butir1	75.0316	.308	.834
butir2	75.9053	.052	.847
butir3	75.0000	.263	.835
butir4	75.2211	.377	.831
butir5	75.2632	.394	.830
butir6	75.2526	.474	.829
butir7	75.1158	.312	.834
butir8	74.9474	.404	.830
butir9	75.8316	.502	.826
butir10	75.6842	.580	.821
butir11	75.2947	.559	.822
butir12	75.4737	.526	.824
butir13	75.6316	.543	.823
butir14	75.5053	.315	.834
butir15	75.5368	.302	.835
butir16	75.1263	.442	.828
butir17	74.9158	.329	.833
butir18	75.4000	.567	.822
butir19	74.9684	.564	.823
butir20	75.0947	.505	.826

Sumber : Hasil Olah Data

Tabel diatas menunjukkan validitas butir-butir pertanyaan yang ada pada kuesioner. Butir pertanyaan yang dinyatakan valid harus memenuhi syarat di atas 0,2. Perhatikan pada kolom Corrected Item-Total Corelation. Jika pada kolom ini, semua butir memiliki nilai korelasi butir dengan total butir diatas 0,2 maka butir-butir tersebut sudah valid.

Dari 20 butir pernyataan yang terdapat pada responden hanya pernyataan butir 2 yang tidak memenuhi kriteria validitas ($r > 0,2$). Sedangkan butir pernyataan yang lain telah memenuhi kriteria validitas ($r > 0,2$). Oleh karena itu maka selanjutnya akan diuji kembali reliabilitas dan validitas data tanpa mengikutkan pernyataan butir 2 (dua).

4.4.3 Reliabilitas Data tanpa Butir Dua

Hasil uji reliabilitas data tanpa mengikutkan pernyataan butir 2 (dua) dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas tanpa Butir Dua

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	19

Sumber : Hasil Olah Data

Tabel di atas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,847. Nilai tersebut lebih besar dari nilai Cronbach's Alpha sebelumnya (masih terdapat butir 2) yaitu 0,837. Meskipun keduanya sama-sama menyatakan reliabel ($>0,6$) namun dari perbedaan nilai Cronbach's Alpha dapat dilihat bahwa pernyataan butir 2 mereduksi nilai Cronbach's Alpha.

4.4.4 Validitas Data tanpa Butir Dua

Berikut hasil uji validitas jawaban responden tanpa mengikutkan pernyataan butir 2:

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas tanpa Butir Dua

	Scale Mean if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
butir1	71.6632	.296	.845
butir3	71.6316	.241	.847
butir4	71.8526	.341	.844
butir5	71.8947	.412	.841
butir6	71.8842	.487	.840
butir7	71.7474	.306	.845
butir8	71.5789	.416	.841
butir9	72.4632	.507	.838
butir10	72.3158	.585	.833
butir11	71.9263	.560	.834
butir12	72.1053	.562	.833
butir13	72.2632	.576	.833
butir14	72.1368	.336	.844
butir15	72.1684	.262	.848
butir16	71.7579	.416	.841
butir17	71.5474	.364	.843
butir18	72.0316	.551	.834
butir19	71.6000	.591	.834
butir20	71.7263	.496	.838

Tabel di atas menunjukkan semua pernyataan dapat dinyatakan valid dengan memperhatikan nilai pada kolom Corrected Item Total Correlation. Semua nilai pada kolom tersebut lebih besar dari 0,2 sehingga semua butir pernyataan telah valid dan selanjutnya dapat dianalisis tanpa mengikutkan pernyataan butir 2.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini ialah asumsi normalitas dan homogenitas. Asumsi normalitas merupakan syarat untuk melakukan analisis menggunakan statistik parametrik yaitu data harus berdistribusi normal. Asumsi homogen harus terpenuhi untuk mencegah kemungkinan terjadi bias

pada data sehingga pemahaman responden terhadap item kuesioner harus dipastikan homogen atau seragam.

4.5.1 Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka terlebih dahulu data harus memenuhi asumsi normalitas. Untuk melakukan uji statistik parametrik maka data yang digunakan harus berdistribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan nilai Kolmogorov-Smirnov, berikut tabel hasil uji normalitas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	Df	Sig.
X	.084	95	.094
Y	.151	95	.000

Sumber : Hasil Olah Data

Kriteria Pengujian:

- Jika Sig. > 0,05 maka variabel memenuhi asumsi normal.
- Jika Sig. < 0,05 maka variabel tidak memenuhi asumsi normal

Kriteria untuk normalitas data ialah nilai p (Sig.) lebih besar dari 0,05. Pada tabel di atas hanya variabel X yang memenuhi asumsi normalitas karena memiliki nilai Sig. 0,094 sedangkan untuk variabel Y belum memenuhi asumsi normalitas. Untuk selanjutnya maka akan diperhatikan uji normalitas menggunakan teknik *predicted value* dengan memperhatikan nilai residual data. Hasil uji normalitas menggunakan predicted value adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji Normalitas Data dengan *Predicted Value*

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Predicted Value	.084	95	.094

Sumber: Hasil Olah Data

Dari nilai di atas diperoleh nilai Sig. 0,094, nilai tersebut lebih besar dari nilai $p=0,05$. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kedua variabel telah memenuhi asumsi normalitas dapat dianalisis menggunakan statistik parametrik.

4.5.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk melihat pemahaman responden terhadap pernyataan di kuesioner. Jika memenuhi asumsi homogen maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pemahaman yang berbeda terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Uji ini dilakukan dengan metode Levene Statistic dengan kriteria jika nilai Sig. lebih besar dari $p (0,05)$ maka data dinyatakan memenuhi asumsi homogen sedangkan jika nilai Sig. lebih kecil dari $p (0,05)$ maka data dinyatakan tidak memenuhi asumsi homogen. Hasil uji homogenitas data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Uji Homogenitas

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.567	14	75	.109

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas nilai Sig. yang diperoleh dari nilai Levene Statistic ialah 0,109. Nilai tersebut lebih besar dari nilai $p (0,05)$ sehingga dapat dinyatakan data yang diperoleh telah memenuhi asumsi homogen. Hasil tersebut bermakna bahwa responden memiliki pemahaman yang sama terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner.

4.6 Analisis Statistik

Analisis statistik dilakukan dengan memperhatikan nilai R Square dan menguji hipotesis dengan melakukan uji T-parsial. Nilai R Square menunjukkan ketepatan model yang digunakan sedangkan uji T-parsial untuk mengambil kesimpulan terhadap hipotesis yang telah diajukan dengan melihat nilai t_{hitung} dan kemudian membandingkannya dengan nilai t_{tabel} serta memperhatikan signifikansi hasil uji T-parsial.

4.6.1 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai R Square. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa kuat variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu memengaruhi variabel dependen. Berikut ini tabel nilai R Square:

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.621 ^a	.386	.380	1.94442

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,386. Adapun kriteria nilai R Square ialah interval 0 sampai 1, dimana jika nilai yang diperoleh makin mendekati 1 maka model yang digunakan semakin baik. Dari nilai R Square 0,386 dapat dinyatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 38,6% sedangkan 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

4.6.2 Uji Parsial (Uji -t)

Uji parsial atau biasa juga dikatakan uji t (t-test) merupakan teknik pengujian hipotesis dengan melihat pengaruh variabel secara terpisah. Pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen akan di uji secara terpisah, dalam artian setiap variabel X di uji pengaruhnya terhadap variabel Y.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah,

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT
- H_a : Terdapat pengaruh e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT

Hipotesis tersebut dianalisis dengan analisis regresi sederhana dan diuji dengan Uji T-parsial. Berikut hasil Uji t parsial :

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.461	2.250		3.317	.001
X	.313	.041	.621	7.649	.000

Sumber : Hasil Olah Data

$$t_{\text{tabel}} = 1,9855$$

Dari hasil pengujian diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,461 + 0,313X$$

Nilai konstanta 7,461 menunjukkan bahwa jika penerapan e-SPT PPN bernilai nol atau tidak ada pengaruh maka rata-rata efisiensi pengisian SPT bernilai 7,461. Koefisien regresi 0,313 bermakna bahwa jika penerapan e-SPT PPN meningkat sebesar satu satuan maka efisiensi akan meningkat sebesar 0,313. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan penerapan e-SPT PPN memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi pengisian SPT.

Untuk uji hipotesis, nilai t_{hitung} ditunjukkan pada kolom t baris kedua yaitu sebesar 7,469. Nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,9855) sehingga dapat dinyatakan H_0 ditolak atau H_a diterima. Oleh karena itu maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SPT PPN Masa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pengisian SPT, dimana pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai t hitung yang di hasilkan yaitu 7,649 lebih besar dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,9858 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga H_0 yang diajukan ditolak dan H_a diterima. Koefisien regresi sebesar 0,313 menyatakan bahwa jika variabel penerapan e-SPT PPN Masa ditingkatkan sebesar satu satuan, maka efisiensi pengisian SPT akan bertambah 0,313. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-SPT PPN Masa maka dapat meningkatkan efisiensi pengisian SPT.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012) yang menjelaskan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT. Hal ini sejalan dengan tujuan Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan e-SPT.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis statistic dengan menggunakan software SPSS, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya terkait penerapan e-SPT PPN dan efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN terhadap efisiensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut persepsi Wajib Pajak.
2. Penerapan e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak sudah baik terutama dalam empat aspek yang menjadi indikator yaitu :
 - a) Mayoritas persepsi wajib pajak mengenai urgensi diterapkannya e-SPT mencapai 88,4% responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju atau termasuk kategori baik
 - b) Persepsi wajib pajak mengenai tujuan penerapan e-SPT menunjukkan 93% responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju atau termasuk kategori baik
 - c) Persepsi wajib pajak terhadap sosialisasi kepada wajib pajak mengenai penerapan e-SPT mencapai 70,8% responden menyatakan sangat setuju dan setuju atau termasuk dalam kategori baik

- d) Persepsi wajib pajak mengenai kendala dalam penerapan e-SPT menunjukkan 80,4% responden yang menjawab sangat setuju dan setuju atau termasuk kategori baik.
3. Pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak sudah efisien artinya telah memenuhi tiga aspek yaitu :
- a) Wajib pajak berpersepsi mengenai kecepatan pengisian SPT setelah diterapkannya e-SPT menunjukkan 89,05% responden menjawab sangat setuju dan setuju atau termasuk kategori baik
 - b) Persepsi wajib pajak terhadap keakuratan pengisian SPT setelah diterapkannya e-SPT menunjukkan 92% responden menjawab sangat setuju dan setuju atau termasuk dalam kategori baik
 - c) Persepsi wajib pajak terhadap efisiensi ruang pengarsipan setelah diterapkannya e-SPT mencapai 95% yang menyatakan bahwa efisiensi ruang pengarsipan dapat dilakukan setelah diterapkannya e-SPT.
4. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menggunakan Uji t-parsial diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT. Besar pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT berdasarkan koefisien determinasi adalah 38,6% sedangkan faktor lain yang tidak diteliti memengaruhi 61,4%.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi efisiensi pengisian e-SPT.

Selain itu agar lebih akurat penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih besar mencakup semua pengguna *e-SPT* yang ada. Selain itu perlu diperluas pula indikator dari variable penelitian khususnya mengenai efisiensi pengisian *e-SPT* PPN mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan *e-SPT* PPN terhadap efisiensi pengisian *SPT* hanya sebesar 38.6%. oleh karena itu saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variable penelitian ditinjau dari aspek yang berbeda misalnya kepraktisan pelaporan, keamanan data, dan kemudahan pemakai *e-SPT*.

5.2.2 Saran Untuk Institusi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan *e-SPT* kepada wajib pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga wajib pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya *e-SPT*, tujuan serta manfaat penerapan *e-SPT* sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas *e-SPT* sebagai sarana pelaporan pajak terutang.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan system *e-SPT* secara terus menerus sehingga kendala dalam penerapan *e-SPT* oleh wajib pajak tidak ada lagi. Dengan kata lain sistem *e-SPT* harus lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah

- Jawaban responden berupa persepsi,
- Objek penelitian hanya 1 (satu) Pengusaha Kena Pajak.
- Keterbatasan variabel independen yaitu hanya 1 (satu) yang memengaruhi variable dependen

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013*.(online), (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf>, diakses pada 10 April 2014).
- Diana, Anastasia, dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Jakarta: Andi
- Juhardini. 2013. *Efektivitas elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.2004.Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Malajaya*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik*. 2009. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 11/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai*. 2013. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 21/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai*. 2013. Jakarta: Direktuir Jendral Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. 2010. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Priyanto, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS.* Yogyakarta: Gava Media

Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rochmat, Soemitro. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 1.* Bandung: PT Eresco

Said, Darwis, et al. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT Refika Aditama

Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition.* United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.

Sitompul, Veronika T. 2010. *Pengaruh Penerapan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-Spt PPN) Terhadap Tingkat Kepuasan PKP Pengguna Aplikasi e-Spt PPN (Studi Kasus Pada PKP di KPP Bandung Karees).* Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu selaku responden
Di tempat,

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul ***“Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPN Masa Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Kena Pajak pada KPP Makassar Selatan)”***, maka dengan ini saya sampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Kuesioner ini terdiri dari tujuh (7) dimensi yang harus dijawab, yaitu item-item pertanyaan terkait urgensi diterapkannya sistem SPT elektronik (e-SPT), tujuan penerapan sistem e-SPT, sosialisasi kepada Wajib Pajak, Kendala dalam penerapan e-SPT, kecepatan, keakuratan, dan efisiensi ruang penyimpanan/pengarsipan bagi Wajib Pajak

Dalam menjawab kuesioner ini penulis berharap Saudara/i berkenan menjawab dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang disediakan pada tiap-tiap pertanyaan terdiri dari lima (5) skala likert, pilihlah salah satu dari jawaban tersebut yang menurut anda paling sesuai. Penelitian ini bersifat kajian ilmiah murni dan tidak terkait dengan tujuan bisnis maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat politis. Dengan demikian diharapkan Bapak/ibu bersedia memberikan jawaban secara jujur dan obyektif sesuai dengan pengetahuan Bapak/ibu.

Atas bantuan Bapak/ibu, saya ucapkan banyak terimakasih.

Peneliti

Akhmad Maulana Abduh

Nama Perusahaan : _____ (Bisa Dikosongkan)

Beri tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

R = Ragu-Ragu

Variabel Independen (X)						
No.	Pertanyaan	STS	TS	R	S	SS
Urgensi diterapkannya sistem e-SPT		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	e-SPT PPN merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KPP kepada Wajib Pajak.					
2.	Sering terjadinya kesalahan dalam pengisian dan perhitungan SPT, tidak mungkin lagi dapat di minimalisir dengan sistem SPT manual.					
3.	Bagi Wajib Pajak yang menerbitkan dokumen pajak dalam jumlah besar setiap bulan pelaporan SPT secara media elektronik menjadi sangat dibutuhkan.					
4.	Perekaman data SPT oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPT manual menghabiskan waktu yang relatif lama.					
Tujuan Penerapan sistem e-SPT						
5.	Dengan adanya e-SPT mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT).					
6.	Dengan adanya e-SPT, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak.					
7.	Dengan adanya e-SPT, dapat meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data					
8.	Dengan adanya e-SPT, data perpajakan Wajib Pajak dapat terorganisir dengan baik dan sistematis.					

Sosialisasi kepada Wajib Pajak						
9.	Direktorat Jendral Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada Wajib Pajak.					
10.	Wajib Pajak Telah memahami manfaat dan tujuan penerapan e-SPT					
11.	Dengan adanya sosialisasi tersebut, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT.					

Kendala dalam penerapan e-SPT		STS	TS	R	S	SS
12.	Sarana dan prasarana di KPP Makassar Selatan tempat Wajib Pajak terdaftar cukup memadai dalam rangka penerapan e-SPT.					
13.	Layan konversi data untuk sinkronisasi format data ASP (<i>Application Service Provider</i>) dengan sistem DJP dalam aplikasi e-SPT telah disediakan oleh ASP selaku penyedia jasa aplikasi.					
14.	Para fiskus di KPP Makassar Selatan telah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem e-SPT.					
Variabel Dependen (Y)						
Kecepatan						
15.	Dengan adanya e-SPT, kesalahan dalam perhitungan dapat dengan cepat diketahui.					
16.	Dengan adanya e-SPT, dapat dilakukan penghematan waktu dalam perhitungan dan pelaporan SPT.					
Keakuratan						
17.	Dengan adanya e-SPT, jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang.					
18.	Dengan adanya e-SPT, keakuratan data dalam pengisian SPT lebih terjamin dan kesalahan dalam mengolah data-data perpajakan menjadi berkurang.					
Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan						
19.	Dengan adanya e-SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan lebih sistematis.					
20.	Dengan adanya e-SPT, dapat mengemat biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan pada proses pengisian dan pelaporan e-SPT.					

Lampiran 2

Jawaban Responden Variabel X

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54
2	5	2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	53
3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	53
4	4	2	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	54
5	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	4	53
6	4	2	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	4	52
7	5	4	5	5	5	4	4	4	2	4	4	2	2	2	52
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50
9	5	4	5	5	5	4	4	4	2	4	4	2	2	2	52
10	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	63
11	4	2	4	4	5	4	3	3	3	4	4	3	3	4	50
12	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	61
13	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	59
14	3	3	4	3	4	4	4	4	1	2	3	2	3	2	42
15	4	3	4	4	4	4	3	3	2	3	3	4	4	3	48
16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	54
17	5	2	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	62
18	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	5	5	5	4	53
19	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	44
20	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	55
21	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	58
22	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3	4	50
23	5	4	5	4	4	4	5	5	3	4	5	4	3	4	59
24	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	56
25	4	3	4	3	4	4	4	5	3	3	4	3	4	3	51
26	4	4	5	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	53
27	4	3	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	53
28	4	3	5	4	3	5	5	5	4	4	4	5	4	4	59
29	4	4	4	4	2	4	4	3	1	1	1	3	1	4	40
30	5	4	5	5	5	5	5	5	2	3	4	3	4	3	58
31	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3	4	50
32	4	2	4	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	4	48
33	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	2	2	4	50
34	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	67
35	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	4	52
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	55
37	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	53
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	53

39	5	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	54
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	54
41	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
42	4	3	5	5	4	4	4	5	3	3	4	4	4	3	55
43	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	67
44	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	61
45	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	50
46	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	50
47	4	4	5	5	4	4	5	5	1	2	4	4	3	2	52
48	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	56
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	53
50	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	50
51	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	67
52	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	5	55
53	4	2	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	4	52
54	4	4	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	58
55	4	4	5	5	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	58
56	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	3	5	61
57	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	60
58	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	5	3	4	56
59	4	4	4	5	5	5	5	5	2	4	4	2	2	2	53
60	4	4	5	5	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	53
61	4	3	4	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	57
62	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	61
63	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	58
64	4	2	5	3	5	4	5	5	3	4	4	5	4	4	57
65	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	59
66	4	5	4	4	4	4	5	2	4	5	5	4	4	4	58
67	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	3	62
68	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	51
69	5	4	4	4	4	3	4	5	3	3	3	4	3	4	53
70	4	3	4	4	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	56
71	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	4	4	56
72	4	2	4	3	3	4	4	5	2	3	5	4	4	4	51
73	4	3	4	3	3	4	5	5	4	3	3	4	3	4	52
74	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	58
75	4	2	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4	54
76	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	57
77	1	3	5	4	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4	52
78	3	3	4	3	4	4	4	4	1	2	3	2	3	2	42
79	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	2	2	4	4	50
80	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	2	2	4	50

81	5	3	4	4	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	57
82	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	59
83	5	2	4	3	4	4	5	5	3	4	5	5	4	4	57
84	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	55
85	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	50
86	4	3	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	55
87	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	61
88	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	53
89	5	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	60
90	4	3	4	5	4	5	5	4	3	3	4	4	4	5	57
91	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	52
92	5	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	53
93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	55
94	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	58
95	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	5	4	4	57

Lampiran 3

Jawaban Responden Variabel Y


NO	15	16	17	18	19	20	TOTAL
1	3	4	4	3	4	4	22
2	2	4	4	2	4	2	18
3	3	4	4	2	4	3	20
4	2	4	4	4	5	4	23
5	5	4	4	4	5	4	26
6	4	4	5	5	5	4	27
7	4	4	4	4	4	5	25
8	4	4	3	4	4	4	23
9	4	4	4	4	4	5	25
10	5	5	5	5	5	5	30
11	3	4	5	3	4	5	24
12	4	5	4	4	5	4	26
13	4	5	5	4	4	4	26
14	4	4	4	3	4	3	22
15	2	3	4	4	4	4	21
16	4	4	5	4	5	5	27
17	4	4	5	5	5	5	28
18	4	5	5	4	4	4	26
19	2	3	4	2	3	4	18
20	4	4	4	4	4	4	24
21	3	4	4	4	4	4	23
22	4	4	4	4	3	4	23
23	3	4	5	4	4	4	24
24	4	4	5	3	3	5	24
25	2	3	4	3	3	4	19
26	4	5	3	4	4	5	25
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	5	3	5	5	26
29	4	4	3	2	3	2	18
30	5	5	5	5	5	5	30
31	4	4	4	4	3	4	23
32	3	4	5	3	4	4	23
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	5	5	5	5	5	29
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	4	4	4	4	4	23
38	4	4	4	4	4	4	24

39	5	5	5	4	4	4	27
40	3	4	5	5	5	5	27
41	5	5	5	4	5	5	29
42	3	4	5	4	5	5	26
43	4	5	5	5	5	5	29
44	4	4	5	4	4	4	25
45	4	4	5	4	4	4	25
46	3	4	4	4	4	4	23
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	5	4	4	4	25
51	4	5	5	5	5	5	29
52	4	4	4	4	5	4	25
53	4	4	5	5	5	4	27
54	4	4	4	4	5	5	26
55	4	4	4	4	5	5	26
56	4	5	5	4	5	4	27
57	4	5	4	4	5	4	26
58	4	5	5	4	5	4	27
59	4	4	4	4	4	5	25
60	4	5	3	4	4	5	25
61	4	4	4	5	4	5	26
62	4	5	4	4	5	4	26
63	4	5	4	4	4	4	25
64	2	4	5	2	4	4	21
65	4	2	4	4	4	4	22
66	5	4	4	4	4	4	25
67	4	5	3	4	4	5	25
68	4	4	5	4	4	3	24
69	2	4	4	3	4	4	21
70	3	4	4	4	5	5	25
71	4	4	5	4	5	4	26
72	3	5	5	4	5	4	26
73	3	4	5	4	5	4	25
74	4	5	5	4	4	4	26
75	4	4	4	4	4	4	24
76	3	5	5	3	5	5	26
77	4	4	4	4	4	5	25
78	4	4	4	3	4	3	22
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	4	4	4	24

81	4	4	5	4	5	4	26
82	5	5	4	4	5	4	27
83	4	4	5	4	4	4	25
84	2	4	5	4	5	4	24
85	3	2	4	3	4	4	20
86	4	5	5	5	5	4	28
87	4	4	4	4	5	4	25
88	4	2	4	2	5	4	21
89	4	3	4	4	5	5	25
90	4	4	5	5	5	4	27
91	4	4	5	4	4	4	25
92	4	4	4	3	3	3	21
93	4	4	4	4	4	4	24
94	3	4	4	4	4	4	23
95	4	5	5	4	4	4	26

Lampiran 4

Bentuk SPT Manual MASA PPN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT
(termasuk Lampiran)
0 Lembar Pelengkap

BAWAHA TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGIJIAN SPT MASA PPN, BERLEBIH X DALAM YANG AKTUAL

NPWP :

MASA :

HP : KUP : Pembetulan No. : **Wajib PPNBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1 Rp. 0		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. 0 Rp. 0		
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. 0 Rp. 0		
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. 0 Rp. 0		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. 0 Rp. 0		
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5) Rp. 0 Rp. 0		
B. Tidak Terutang PPN Rp. 		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (JA + IB) Rp. 0		

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2) 1 Rp. 0

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp.

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. 0

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (LA - IIB - IIC) Rp. 0

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan Rp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (I.D - I.E) Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir I.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir I.D atau ☐ Butir I.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.

B. PPN Terutang : Rp.

C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.

B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPNBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. 0

B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp.

C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB) Rp. 0

D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan Rp.

E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD) Rp.

F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☐ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN lembar ☐ Surat Kuasa Khusus

☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM lembar ☐ lembar

(dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☐ PKP

☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas :

Jabatan :

Cap Perusahaan :

Lampiran 5

Bentuk e-SPT Bagian I

e-SPT Pajak Pertambahan Nilai [Wajib Pajak : CV. USAHA JAYA MANDIRI]

Program Input Data Setting SPT Tools ?

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Nama PKP : CV. USAHA JAYA MANDIRI NPWP : 01.234.567.4-542.000
 Alamat : JL. RING ROAD UTARA NO. 88 DEPOK Masa : 6 s.d 6 - 2013 Thn Buku : 1 s.d 12
 Telepon : 0274-7654321 HP : KLU : 51900 Pembetulan Ke : 0

BAGIAN I BAGIAN II BAGIAN III - IV - V BAGIAN VI

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. 0	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 60.000.000	Rp. 6.000.000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0	Rp. 0
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 90.000.000	Rp. 9.000.000

B. Tidak Terutang PPN

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp. 90.000.000

Refresh Simpan Cetak Keluar Bantuan

Bentuk e-SPT Bagian II

e-SPT Pajak Pertambahan Nilai [Wajib Pajak : CV. USAHA JAYA MANDIRI]

Program Input Data Setting SPT Tools ?

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Nama PKP : CV. USAHA JAYA MANDIRI NPWP : 01.234.567.4-542.000
 Alamat : Jl. RING ROAD UTARA NO. 88 DEPOK Masa : 6 s.d 6 - 2013 Thn Buku : 1 s.d 12
 Telepon : 0274-7654321 HP : KLU : 51900 Pembetulan Ke : 0

BAGIAN I BAGIAN II BAGIAN III - IV - V BAGIAN VI

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A-2) Rp. 6.000.000

B. PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama Rp.

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 3.000.000

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 3.000.000

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan
 Nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan sebelumnya : Rp. 0

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp.

G. PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal .. NTPN : ..

H. PPN lebih dibayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk 3.1 ☐ Dikonpensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

Refresh Simpan Cetak Keluar Bantuan

Bentuk e-SPT Bagian III, IV, dan V

e-SPT Pajak Pertambahan Nilai [Wajib Pajak : CV. USAHA JAYA MANDIRI]

Program Input Data Setting SPT Tools ?

Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Nama PKP : CV. USAHA JAYA MANDIRI NPWP : 01.234.567.4-542.000
 Alamat : JL. RING ROAD UTARA NO. 88 DEPOK Masa : 6 s.d 6 - 2013 Thn Buku : 1 s.d 12
 Telepon : 0274-7654321 HP : KLU : 51900 Pembetulan Ke : 0


BAGIAN I	BAGIAN II	BAGIAN III - IV - V	BAGIAN VI
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp.		0	
B. PPN Terutang Rp.		0	
C. Dilunasi Tanggal		..	
		NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI			
A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp.		0	
B. Dilunasi Tanggal		..	
		NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH			
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri		Rp.	
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp.	
C. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp.	
D. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp.	
E. PPNBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp.	
F. PPNBM kurang dbayar dilunasi tanggal		..	
		NTPN :	

Refresh Simpan Cetak Keluar Bantuan

Bentuk e-SPT Bagian VI

e-SPT Pajak Pertambahan Nilai [Wajib Pajak : CV. USAHA JAYA MANDIRI]

Program Input Data Setting SPT Tools ?



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Nama PKP : CV. USAHA JAYA MANDIRI NPWP : 01.234.567.4-542.000
 Alamat : JL. RING ROAD UTARA NO. 88 DEPOK Masa : 6 s.d 6 - 2013 Thn Buku : 1 s.d 12
 Telepon : 0274-7654321 HP : KLU : 51900 Pembetulan Ke : 0

BAGIAN I BAGIAN II BAGIAN III - IV - V BAGIAN VI

VI. KELENGKAPAN SPT

Nama Lampiran	Jumlah Lembar
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	
<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN	1

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
 SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
 BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
 ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP
☐ Kuasa

29 Mei 2013

Refresh Simpan Cetak Keluar Bantuan

Bentuk e-SPT Siap Cetak

e-SPT Pajak Pertambahan Nilai [Wajib Pajak : CV. USAHA JAYA MANDIRI] - [Print Preview]

Program Input Data Setting SPT Tools ?

1 of 1 Whole Page Find / Next

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) FORMULIR 1111

Wajib Pajak: CV. USAHA JAYA MANDIRI
 Nomor SPT: 0123456789
 Masa Pajak: 01/2013
 Jenis Pajak: PPN

A. DATA WILAYAH

1. Kode Wilayah: 01
 2. Kode Kecamatan: 01
 3. Kode Desa/Kelurahan: 01

B. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang diperiksa: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 3. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

C. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

D. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

E. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

F. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

G. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

H. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

I. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

J. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

K. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

L. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

M. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

N. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

O. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

P. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

Q. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

R. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

S. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

T. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

U. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

V. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

W. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

X. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

Y. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

Z. PEMERIKSAAN BUKTI BAYAR

1. Jumlah Faktur Pajak yang sah: 10
 2. Jumlah Faktur Pajak yang tidak sah: 0

PERNYATAAN :

1. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

4. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

5. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

6. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

7. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

8. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

9. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

10. Saya menyatakan bahwa data yang saya nyatakan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.